

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

NURAINUN WIRFIANA



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURAINUN WIRFIANA
A011171501**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh :

NURAINUN WIRFIANA

A011171501

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

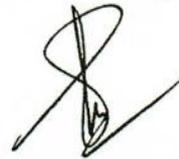
Makassar, 20 Januari 2021

Pembimbing I



Dr. Agussalim, SE., M. Si.
NIP. 19670817 199103 1 006

Pembimbing II



Drs. A. Baso Siswadharmo, M. Si.
NIP. 19611018 198702 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M. Si.
NIP. 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh :

NURAINUN WIRFIANA

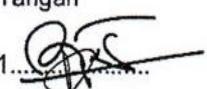
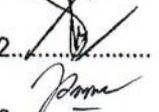
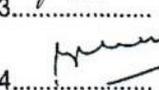
A011171501

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 20 Januari 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Mengetahui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr.Agussalim,SE.,M.Si.	Ketua	1..... 
2	Drs.A.Baso Siswadharna,M.Si.	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Paulus Upun,SE.,MA.	Anggota	3..... 
4	Drs.Muhammad Yusri Zamhuri,MA.,Ph.D.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sanusi Pattah,SE.,M.Si
NIP. 19690413 199403 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telp. (0411) 583851, 585605 Pswt 2210, 2212, 2607, 2808 Fax. (0411) 587218
Webmail: <http://feb.unhas.ac.id> Email: feb@unhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Nurainun Wirfiana**
Nomor Pokok : A011171501
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Pertumbuhan Inklusif dan Kemiskinan di Indonesia*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 20 Januari 2021
Yang Menyatakan



(Nurainun Wirfiana)

No. Pokok: A011171501

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pertumbuhan Inklusif dan Kemiskinan di Indonesia”**. Shalawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa manusia dari lembah kejahiliyaan menuju puncak kejayaan Islam.

Pada Kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam setiap proses penyusunan hingga pada perampungan skripsi ini. Dengan penuh penghormatan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan:

- Kepada kedua orang tua penulis, Hj. Nurwiah,S.Pd. dan Drs.H.Sudirman,M.Pd.,P.hD. yang senantiasa menjadi tokoh inspirasi dan motivator utama penulis, menjadi pihak yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, nasihat, serta yang tak kalah penting yakni doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Semoga surga yang menjadi balasan atas segala yang telah mereka berikan
- Kepada saudara penulis Widya Ardiana Sari,S.Kep , Dirwan Surahmad,S.Pd dan Surwih Ardiman,S.E serta kakak ipar Abd. Rahman,S.M , Dian Febriani,S.Pd dan Sri Putri Maryunira,S.Pd. atas segala perhatian,kasih sayang,dan dukungan baik berupa materi atau non materi kepada penulis. Tidak lupa kepada keponakan-keponakan

penulis Lutfhy Aryaridha,Ahyan Fadhil Arya Syifa,Aina Alisha Rahya,Ainin Qalesha Rahya,Adzkia Rahilah dan Abiyan Rizqullah atas hiburannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga mereka dilindungi oleh Allah Swt.

- Kepada dosen pembimbing penulis, Dr.Agussalim,S.E.,M.Si sebagai pembimbing 1 dan Drs.A.Baso Siswadharna M.Si sebagai pembimbing 2 sekaligus Penasehat Akademik (PA) atas segala arahan dan bimbingannya kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Serta kepada Dr.Paulus Uppun S.E.,M.A. dan Drs.Muhammad Yusri Zamhuri,MA.Ph.D sebagai dosen penguji penulis atas saran,kritikan,dan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada keluarga besar Mahmud Family's dan Bapak Sinring Family's senantiasa memberikan dukungan moral dan nasihat kesuksesan kepada penulis. Semoga jalinan silaturahmi dan kekeluargaan tetap berjalan dengan rukun dan semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan-Nya.
- Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S1, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Prof Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unhas.
- Kepada teman-teman ERUD17E (Ilmu Ekonomi 2017) yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas segala kekompakannya dan dukungannya dari maba sampai saat ini. Semoga segala urusan mereka diperlancar dan cepat-cepat selesai juga jangan lama-lama. Dan terkhusus kepada teman-teman sefrekuensi penulis Adinda Asiah

Minhikmah Alena Pituleng Yunus,S.E.,A.Nurwahyuningsih (SE soon), Tiara Risang Ayu (SE soon),Risna Zulfiana (SE soon) dan Maghfirah maulani atas kerecehan dan pendengar yang baik kalau penulis lagi galau. Serta tak lupa pula sist Wafiqah Ulya,S.E yang telah bersedia memberikan jawaban kepada penulis kalau bertanya mengenai skripsi ini. Semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi Allah Swt.

- Kepada keluarga mahasiswa Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HIMAJIE) yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu atas motivasi dan rasa kekeluargaannya kepada penulis. Semoga tetap me'merah' yang katanya senior "HIMAJIE SAMPAI MATI"
- Kepada kakanda andalancu Kak Imran, atas motivasinya dan dukungan materi dan non materi kepada penulis serta senantiasa mendampingi secara virtual dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki melimpah dari Allah Swt.
- Kepada geng Devils Attack, A.Nadiah Khairunnisa, Nurul Fajryani, Eka Putri Wulandari, A.Sabira Alfiah, A.Muhammad Fathur, Eka Wahyu Kriswanto , Muh.Lutfi Syam dan Bang dede cantika atas kerecehan dan ngelawak nya selama ini. Semoga tetap kompak dan sehat selalu.
- Kepada pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melancarkan urusan serta melimpahkan keberkahan-Nya pada kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Jika terdapat

kesalahan dalam skripsi ini, maka kesalahan tersebut sepenuhnya bersumber dari penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 20 Januari 2021

Nurainun Wirfiana

ABSTRAK

Analisis Pertumbuhan Inklusif dan Kemiskinan di Indonesia

Nurainun Wirfiana
Agussalim
A.Baso Siswadharma

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi serta untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk pertumbuhan inklusif atau tidak. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dari tahun 2005 hingga 2019. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi simultan, dan untuk mengukur pertumbuhan inklusif menggunakan metode *Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR)*. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum termasuk pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan, ketimpangan, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

Kata Kunci : *Pertumbuhan inklusif, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF INCLUSIVE GROWTH AND POVERTY IN INDONESIA

Nurainun Wirfiana
Aggussalim
A.Baso Siswadharna

This study aims to determine the effect of social protection sector government spending, education sector government spending, and health sector government spending on poverty both directly and indirectly through economic growth and to determine Indonesia's economic growth including inclusive growth or not. The data used are secondary data sourced from the Badan Pusat Statistik (BPS) and the Ministry of Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) reports from 2005 to 2019. The analytical method used is a simultaneous regression analysis model, and to measure inclusive growth using the -Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) method. The results showed that government expenditure in the social protection sector and government expenditure in the education sector had a negative and significant direct effect on poverty, while government expenditure on the health sector had a positive and insignificant effect on poverty. Then the social protection sector government expenditure, education sector government expenditure, and health sector government expenditure do not have a significant effect on poverty through economic growth. The research results also show that Indonesia's economic growth does not include inclusive growth in reducing poverty, inequality, and expanding employment.

Keywords: Inclusive growth, poverty, economic growth, social protection sector government expenditure, education sector government expenditure, and health sector government expenditure.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian dan Konsep Kemiskinan.....	8
2.1.2 Pengertian dan Konsep Pertumbuhan Inklusif.....	11
2.1.4 Pengertian dan Konsep Pengeluaran Pemerintah.....	14
2.1.5 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan	16
2.1.6 Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.7 Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan.....	17
2.2 Tinjauan Empiris	18
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	23
2.4 Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	26

3.2 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.4 Metode Analisis Data	27
3.5 Definisi Operasional	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Republik Indonesia	36
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian	36
4.2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	37
4.2.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah sektor Perlindungan Sosial,Pendidikan,dan Kesehatan di Indonesia Tahun 2005-2019 ..	38
4.3 Hasil Estimasi	43
4.3.1 Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial,Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan,dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan	43
4.3.2 Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan,dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	46
4.4 Hasil Perhitungan Pertumbuhan Inklusif dengan Metode <i>Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR)</i>	51
4.4.1 Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan Kemiskinan ..	51
4.4.2 Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan Ketimpangan	52
4.4.3 Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi dalam Memperluas Penyerapan Tenaga Kerja.....	54
4.5 Pembahasan.....	55
4.5.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	55
4.5.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Kemiskinan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi	57

4.5.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan Ekonomi	59
4.5.4 Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	62
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin	1
Tabel 2.1	Matriks Tinjauan Empiris Penelitian Sebelumnya yang Berkaitan dengan Topik Penelitian.....	21
Tabel 4.1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2019.....	37
Tabel 4.2	Hasil Estimasi Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan Indonesia Tahun 2005 -2019.....	43
Tabel 4.3	Hasil Estimasi Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005 -2019..	46
Tabel 4.4	Hasil Estimasi Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Persentase Penduduk Miskin.....	48
Tabel 4.5	Nilai Koefisien Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Kemiskinan (IGp).....	51
Tabel 4.6	Nilai Koefisien Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Ketimpangan (IGin).....	53
Tabel 4.7	Nilai Koefisien Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Dalam Memperluas Penyerapan Tenaga Kerja (IGem).....	54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	38
Grafik 4.2	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial dengan Persentase Penduduk Miskin	39
Garfik 4.3	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	40
Grafik 4.4	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dengan Persentase Penduduk Miskin.....	41
Grafik 4.5	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	41
Grafik 4.6	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dengan Persentase Penduduk Miskin.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	24
Gambar 4.1	Ringkasan Hasil Estimasi Model.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah penting yang menjadi isu hangat dan masalah perekonomian nasional. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seorang individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, kemiskinan adalah masalah yang kompleks artinya dapat menyebabkan permasalahan lain seperti sosial, agama, politik dan lainnya. Maka dari itu masalah ini masih menjadi fokus utama pemerintah dalam hal mengatasinya.

Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2019

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2005	15,97	5,60
2006	17,75	5,5
2007	16,58	6,9
2008	15,42	6,1
2009	14,15	4,5
2010	13,33	6,22
2011	12,36	6,17
2012	11,66	6,03
2013	11,47	5,78
2014	10,96	5,01
2015	11,13	4,88
2016	10,7	5,02
2017	10,12	5,07
2018	9,66	5,17
2019	9,22	5,02

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir persentase penduduk miskin yang ada di Indonesia mengalami penurunan, namun pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun mengalami penurunan jumlah, laju penurunan tersebut terbilang lambat yang tercermin dari tahun 2005 hingga 2019 persentase penduduk miskin hanya dapat berkurang sebesar 6,75%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi masih belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selama ini kemiskinan sering dikaitkan dengan masalah ekonomi karena mudah diukur dan diperbandingkan. Padahal kemiskinan juga dapat dicermati melalui dimensi lain seperti pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Ini adalah resiko sosial yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk miskin yang tersebar di berbagai pelosok daerah di Indonesia. Pada titik ini negara memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan warganya terhadap resiko-resiko sosial tersebut. Teori *public finance* (Musgrave, 1989) mengungkapkan bahwa tidak seluruhnya semua masalah ekonomi diselesaikan oleh mekanisme pasar seperti halnya dengan *social goods*. *Social goods* yang dimaksud terkait dengan eksternalitas, distribusi pendapatan, masalah-masalah ekonomi lainnya (pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain). Dalam hal ini mekanisme pasar gagal menyelesaikannya (*market failure*). Karena adanya kegagalan pasar dan dalam kaitannya dengan ketiga peran pemerintah sebagai peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilitasi, maka kewajiban publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang tidak disentuh oleh pasar menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Maka dari itu,

melalui kebijakan fiskal pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran negara dialokasikan lebih optimal untuk mengatasi kemiskinan dalam memperoleh kesempatan pada sektor pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial. Hal ini bertujuan agar semua warga negara, tanpa dibatasi oleh status sosial ekonomi dan letak geografi, dapat memperoleh kesamaan kesempatan dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Kemudian perbandingan pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan. Besaran pengeluaran pemerintah di tiga sektor terus meningkat walaupun mengalami penurunan di satu tahun tertentu. Selain itu, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mempunyai proporsi terbesar diantara tiga pengeluaran pemerintah tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih belum optimal terhadap upaya meningkatkan investasi dalam hal sumber daya manusianya untuk meningkatkan produktivitas.

Isu-isu mengenai kemiskinan juga menjadi fokus pembangunan setiap negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Perhatian utama tentang kemiskinan secara eksplisit dijelaskan pada *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dimana tujuan pertamanya adalah mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan tertera pada tujuan kedelapan. Disebut pertumbuhan inklusif karena pertumbuhan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan inklusif dapat dijadikan sebagai acuan apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dikatakan berkualitas atau tidak. Pertumbuhan yang tinggi tidak menjamin bahwa keuntungan didistribusikan secara adil atau kelompok yang sangat miskin dan terpinggirkan akan mendapat manfaat yang sama. Sementara kebijakan pembangunan masih didominasi oleh

paradigma pertumbuhan sebagai prasyarat untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan manusia.

Pada dasarnya pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas atau inklusif. Karena kebijakan berasal dari pemerintah termasuk didalamnya kebijakan yang akomodatif serta memiliki fundamental ekonomi yang lebih kuat. Dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif dengan meningkatkan produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, peningkatan mutu teknologi dan inovasi termasuk melalui fokus terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya,serta perhatian lebih terhadap investasi sosial. Namun pada kenyataannya, khususnya di Indonesia pemerintah cenderung memfokuskan terhadap pembangunan di sektor jasa dan manufaktur dimana hal ini menyerap lebih sedikit tenaga kerja yang mana pada gilirannya tidak memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Fakta tersebut tentunya menjadi sinyal akan pentingnya upaya dan peran pemerintah dalam merancang dan menciptakan konsep yang lebih luas yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.

Aini (2020) dalam Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur menemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, namun tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa timur. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kemudian menurut Bastias (2010) dalam Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah atas perumahan dan pengeluaran pemerintah atas transportasi signifikan dalam jangka panjang. Jangka pendek, pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jaringan transportasi antar daerah terutama daerah terpencil lebih diutamakan sehingga dapat berperan serta dalam pemerataan pembangunan. Kemudian variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan pengeluaran atas kesehatan tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka panjang dan jangka pendek.

Berdasarkan data-data yang tertera dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan perkapita maupun pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak sebanding dengan angka kemiskinan di Indonesia yang dapat dilihat dari perlambatan penurunan angka kemiskinan. Sejauh ini studi empiris mengenai pengaruh dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan ,dan perlindungan sosial terhadap kemiskinan masih langka khususnya dalam ruang lingkup nasional. Sementara itu studi empiris mengenai pertumbuhan inklusif terhadap kemiskinan cukup banyak namun hasilnya masih menjadi

perdebatan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan penelitian lebih dalam mengenai hal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain :

1. Apakah pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi
2. Apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia sudah termasuk pertumbuhan inklusif

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi
2. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah termasuk pertumbuhan inklusif atau tidak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut :

1. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Kalangan akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penulisan yang akan datang yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian dan Konsep Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, dan papan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. *United Nation Development Program (UNDP)* meninjau kemiskinan dari dua sisi, yaitu dari sisi pendapatan dan kualitas manusia. Dilihat dari sisi pendapatan, kemiskinan ekstrim (*extreme poverty*) atau kemiskinan absolut adalah kekurangan pendapatan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal kalori yang diperlukan. Dari sisi kualitas manusia, kemiskinan secara umum (*overall poverty*), atau sering disebut sebagai kemiskinan relatif, adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, seperti pakaian, energi, dan tempat bernaung (UNDP, 2000).

Menurut Sharp dalam Kuncoro (2006), penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi adalah akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan

oleh rendahnya pendidikan, kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah, yang pada gilirannya upahnya juga rendah. Di sisi lain menurut Kartasasmita (1996) kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik maupun daya tahan pikir.

Ada beberapa jenis pengukuran yang umumnya digunakan di Indonesia untuk mengukur kemiskinan, antara lain :

a. Ukuran Badan Pusat Statistik (BPS)

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan

kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

b. Indeks FGT (*Headcount Index, Poverty Gap Index, dan Poverty Severity Indeks*)

Dalam analisis kemiskinan, indeks FGT (Foster, Greer dan Thorbecke, 1984) merupakan indeks yang paling populer digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Indeks ini dapat diturunkan menjadi 3 (tiga) indeks yang tentu saja sangat sering digunakan dalam kajian kemiskinan yaitu *Headcount Index* (P_0) yaitu ukuran yang menunjukkan persentase jumlah orang miskin dalam populasi. *Poverty Gap Index* (P_1) yaitu ukuran yang menggambarkan selisih pendapatan rata-rata masyarakat miskin dengan garis kemiskinan. *Poverty Severity Index*, yaitu ukuran yang menunjukkan distribusi pendapatan atau pengeluaran diantara masyarakat miskin.

c. Model Kesejahteraan Keluarga

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara khusus mencatat dan melakukan pemantauan keluarga di Indonesia dan hasilnya dikumpulkan dalam satu pangkalan data yang bersifat nasional. Sistem pendataan ini dilakukan secara konsisten dengan pelaporan bulanan dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) kepada BKKBN Pusat, antara lain, tentang data jumlah pengguna kontrasepsi. Pada 1985 BKKBN mengembangkan sistem pendataannya dan melakukan survei perencanaan keluarga nasional.

Pada 1994 BKKBN menambah dua bagian dalam surveinya, yaitu ukuran kesejahteraan keluarga dan karakteristik demografi keluarga. Bagian kesejahteraan keluarga digunakan untuk penargetan keluarga miskin yang dibagi dalam lima kategori kesejahteraan, yaitu keluarga prasejahtera (Pra-KS), keluarga sejahtera satu (KS1), keluarga sejahtera dua (KS2), keluarga sejahtera tiga (KS3), dan keluarga sejahtera tiga plus (KS3 Plus). Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 indikator. Sebuah keluarga dikategorikan sebagai Pra-KS bila belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal atau belum bisa memenuhi indikator satu hingga lima, KS1 bila memenuhi indikator satu hingga lima, KS2 bila memenuhi indikator satu hingga 14, KS3 bila memenuhi indikator satu hingga 21, dan dikategorikan KS3 Plus bila memenuhi seluruh indikator satu hingga 23.

2.1.2 Pengertian dan Konsep Pertumbuhan Inklusif

Pertumbuhan inklusif yang secara khusus di jelaskan oleh konsep Habito (2009). Menurut kesimpulannya, pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat menurunkan kemiskinan. Selain fokus akan kondisi sektor perekonomian, Habito memandang investasi pada fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif.

Min Tang (2008) memberikan perhatian terhadap persoalan kemiskinan dalam kaitannya dengan pertumbuhan inklusif dengan berangkat dari persoalan distribusi pendapatan. Beragam ukuran dan elemen dinyatakan turut memengaruhi apakah pertumbuhan dapat dikatakan inklusif. Ukuran yang paling penting adalah apakah pertumbuhan memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan orang miskin. Orang miskin, yang merupakan pihak dengan posisi

paling tidak menguntungkan dalam pembangunan, memiliki kesulitan untuk memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Karena itu, meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin merupakan prioritas utama dalam agenda pertumbuhan ekonomi, tetapi terbukti sangat sulit untuk dicapai. Pertumbuhan inklusif sangat sering disamakan dengan inklusifitas *pro poor*, dengan demikian pertumbuhan yang tidak *pro poor* sudah pasti tidak inklusif.

McKinley (2010) merincikan dua dimensi pertumbuhan inklusif, yang pertama mencapai pertumbuhan berkelanjutan itu akan menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, dan kedua memastikan akses yang lebih luas ke anggota masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan. Selain itu, Ramos dkk (2013) mengembangkan definisi pertumbuhan inklusif dari McKinley (2010) dengan menetapkan indikator kedua dimensi tersebut yaitu pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

Ada beberapa macam metode pengukuran yang bisa digunakan dalam mengukur pertumbuhan inklusif, diantaranya ialah :

a. *Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)*.

Salah satu metode dalam mengukur pertumbuhan inklusif, dikembangkan oleh Klasen (2010). Metode tersebut diadaptasi dari metode penelitian *pro-poor growth* yang pernah dilakukan oleh Kakwani dan Son (2008) yaitu konsep *Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)*. Dalam metode PEGR, ukuran kemiskinan dimisalkan sebagai fungsi dari garis kemiskinan (z), rata-rata pendapatan (μ), dan kurva Lorenz ($L(p)$) inklusif sebagai pertumbuhan untuk kelompok kurang beruntung. Dalam penghitungan PEGR sendiri terdapat 2

metode, yaitu dengan menggunakan teknik analisis secara *ex-ante* dan *post-ante*. Menggunakan teknik analisis secara *ex-ante* diterapkan berdasarkan asumsi bahwa perubahan ketidakmerataan pendapatan hanya berlangsung dengan cara terjadi pergeseran secara proporsional dan konstan di semua titik pada kurva Lorenz. Padahal pergeseran kurva Lorenz dapat disebabkan banyak hal, sehingga metode penghitungan PEGR secara *ex-ante* ini tidak mungkin untuk dilakukan.

Metode penghitungan PEGR dengan menggunakan teknik analisis *ex-post* dilakukan untuk mengatasi permasalahan penghitungan secara *ex-ante*, yaitu dengan cara membandingkan keadaan kemiskinan, distribusi pendapatan (kurva Lorenz) dan rata-rata pendapatan penduduk pada awal periode dengan keadaan pada akhir periode.

b. Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif (IKPI)

Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif (IKPI) atau *Inclusive Growth Composite Index (IGI)* yang diusulkan McKinley (2010). Dalam metode yang digunakan untuk mengukur IKPI suatu negara tersebut, menggunakan 35 indikator untuk menentukan kriteria pertumbuhan yang inklusif. Indikator-indikator tersebut dirangkum dalam lima dimensi pengukuran, yaitu: dimensi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi; dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan; dimensi kesetaraan gender; dimensi kapabilitas manusia; dimensi perlindungan sosial.

Selanjutnya kelima dimensi tersebut diberi pembobot secara proporsional sehingga dapat mengukur sebuah indeks komposit yang disebut sebagai *Inklusif Growth Index*. Selanjutnya, digunakan suatu besaran sebagai *benchmark* untuk

menunjukkan seberapa memuaskan inklusivitas yang dicapai dari suatu pertumbuhan ekonomi. Untuk masing-masing indikator akan diberi skor, berdasarkan performa capaiannya. Pembentukan skor dibuat menjadi 3 capaian yaitu tidak memuaskan (<4), memuaskan (4-7), dan sangat memuaskan (8-10).

2.1.4 Pengertian dan Konsep Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah secara makro yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya seluruh perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan (Suparmoko, 1987).

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial meliputi jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan

melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN dan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN.

Rostow dan Musgrave (1993) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap ini pemerintah tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar.

Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.

2.1.5 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Mankiw (2005), dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang ada pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Kemudian menurut Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan *necessary condition* (syarat keharusan) bagi pengentasan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja baik seperti di sektor pertanian maupun sektor-sektor padat karya yang pada umumnya banyak digeluti oleh masyarakat berpendapatan menengah kebawah. Adapun secara tidak langsung, hal ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah diperlukan dalam meredistribusi manfaat pertumbuhan yang diperoleh dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur.

Menurut (Siregar dan Wahyuniarti : 2008), pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin.

2.1.6 Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan digambarkan dalam teori pertumbuhan endogen. Di katakan bahwa hasil

investasi justru akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar dengan mengasumsikan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternal positif) dan memacu peningkatan produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan alamiah penurunan skala hasil.

Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa faktor teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal, atau sumber daya manusia, sarana prasarana, infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumber daya manusia diakumulasikan. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung.

2.1.7 Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Menurut Supriyanto dkk (2014) perlindungan sosial juga sangat berdampak dalam pengentasan kemiskinan. Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara.

Menurut Mahmudi (2007), dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya pendapatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya kemiskinan karena tingkat kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Tingkat produktivitas yang rendah lebih lanjut menyebabkan pendapatan rendah, dan pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan itu selanjutnya menyebabkan seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan.

Selain itu, Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Merier dalam Winarti, 2014).

2.2 Tinjauan Empiris

Prabandari, Dwi (2018) dalam penelitiannya analisis inklivitas pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menemukan bahwa semakin besar anggaran pendidikan dan kesehatan, maka akses pendidikan dan kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin akan semakin meningkat. Meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan bagi

masyarakat miskin dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Sehingga produktivitas tenaga kerja masyarakat miskin akan meningkat. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja selanjutnya dapat meningkatkan penghasilan. Ketika penghasilan masyarakat miskin meningkat, maka dapat membantu masyarakat tersebut untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Disisi lain Sholihah (2014) dalam penelitiannya pertumbuhan inklusif : faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap pertumbuhan kelas menengah di Indonesia menemukan bahwa Pendapatan perkapita, investasi pemerintah dalam bentuk modal fisik, dan angka partisipasi sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan yang inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja bukan fenomena yang konsisten di Indonesia.

Menurut Aini (2020) dalam Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur menemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan sebagai bentuk layanan pokok kepada masyarakat masih belum tepat sasaran. Artinya masih banyak penduduk miskin yang belum mendapatkan pendidikan secara layak. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan secara statistik terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang negatif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan sudah tepat sasaran dan terserap. Artinya

pemerintah sudah berupaya mengalokasikan anggaran kesehatan dengan baik agar masyarakat khususnya yang tergolong miskin mendapat pelayanan di bidang kesehatan dengan layak. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan secara statistik terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hubungan negatif dan signifikan yang dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial terhadap kemiskinan pada penelitian ini, sebanding dengan peran penting perlindungan sosial itu sendiri dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kemudian menurut Bastias (2010) dalam Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah atas perumahan dan pengeluaran pemerintah atas transportasi signifikan dalam jangka panjang. Jangka pendek, pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jaringan transportasi antar daerah terutama daerah terpencil lebih diutamakan sehingga dapat berperan serta dalam pemerataan pembangunan. Kemudian variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan pengeluaran atas kesehatan tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka panjang dan jangka pendek.

Tabel 2.1 Matriks Tinjauan Empiris Penelitian Sebelumnya yang Berkaitan
dengan Topik Penelitian

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
Prabandari (2018)	Analisis inkluitas pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya	Analisis persamaan simultan 3SLS.	1. Pendapatan perkapita 2. Anggaran pemerintah sektor pendidikan 3. Anggaran pemerintah sektor kesehatan	Pendapatan perkapita dan kebijakan fiskal berpengaruh positif dan signifikan dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif.
Pratiwi dan Ismal (2018)	Analisis dampak kebijakan fiskal dan sasaran akhir kebijakan moneter terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia	(<i>Ordinary Least Squares</i>).	1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 3. Inflasi 4. Kredit perbankan	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan penyaluran kredit perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia .
Sholihah (2014)	Pertumbuhan inklusif : faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap pertumbuhan kelas menengah di Indonesia	Regresi data panel statis.	1. Pendapatan perkapita 2. Investasi modal fisik 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Pendapatan perkapita, investasi pemerintah dalam bentuk modal fisik, dan angka partisipasi sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan.
Sari (2018)	Determinan tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 – 2014	Regresi Data Panel	1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendapatan perkapita

			3. Pengeluaran pemerintah sektor pekerjaan umum 4. Pendapatan perkapita	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pekerjaan umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
Noviyanti (2014)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2012.	<i>Path Analysis</i>	1. Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan 2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 3. Indeks Pembangunan Manusia 4. Tingkat Kemiskinan	Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
Aini (2020)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	Regresi Data Panel	1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 3. Pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial	Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
Maisarah dan Sri (2020)	<i>The Influence Of Government Expenditure In Health And Education On Poverty In North Aceh</i>	Vector Autoregression (VAR)	1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	Pengeluaran pemerintah pendidikan dan kesehatan dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Bastias (2010)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009	Model Error Correction Model (ECM).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan 2. Pengeluaran pemerintah Atas Kesehatan 3. Pengeluaran Pemerintah Atas Perumahan 4. Pengeluaran Pemerintah Atas Transportasi 	Dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah atas perumahan dan pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan pengeluaran pemerintah atas kesehatan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
-------------------	--	-------------------------------------	--	--

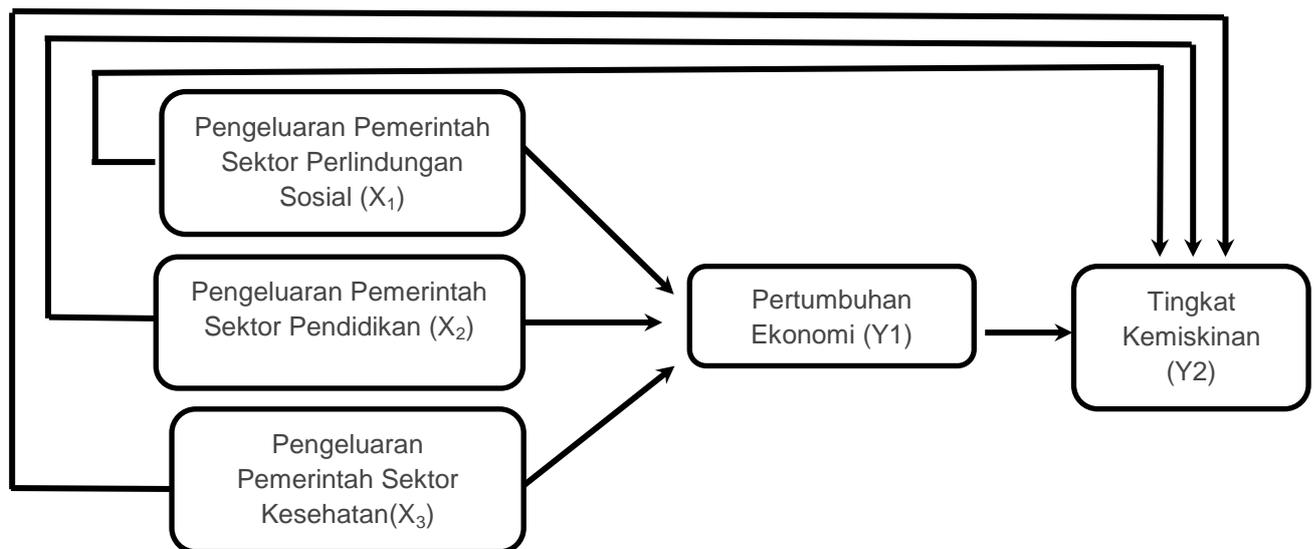
2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan variabel pengeluaran pemerintah menurut fungsi perlindungan sosial (X_1), pengeluaran pemerintah menurut fungsi pendidikan (X_2), dan pengeluaran menurut fungsi kesehatan (X_3) untuk melihat dampaknya terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Belanja pemerintah menurut fungsi yaitu klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut dikelompokkan ke dalam 11 fungsi yang beberapa diantaranya ialah menurut fungsi perlindungan sosial, menurut fungsi pendidikan, dan menurut fungsi kesehatan.

Pengeluaran pemerintah menurut fungsi perlindungan sosial ini diharapkan untuk menjaga konsistensi penurunan tingkat kemiskinan dengan program dan layanan yang dikeluarkan. Pengeluaran pemerintah menurut fungsi

pendidikan yang dianggarkan dalam APBN ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Dan pengeluaran pemerintah menurut fungsi kesehatan digunakan untuk pengadaan obat-obatan maupun peningkatan layanan kesehatan. Intinya ketiga pengeluaran pemerintah menurut fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap pengentasan kemiskinan serta berdampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi apabila alokasi anggaran digunakan secara optimal. Berikut merupakan kerangka pikir dari penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada tinjauan teoritis dan studi penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan diduga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diduga belum termasuk pertumbuhan inklusif.